

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Adrian Sutedi. 2023. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Arba, H. M. 2021. *Hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), Jakarta.
- _____. (2021), *Hukum Agraria Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Diantha, M. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Djojodirdjo, M. A. M. 1982. *Perbuatan Melawan Hukum* (Cet. 2). Jakarta: Pradnya Paramita.
- Fuady, M. 2005. *Perbandingan Hukum Perdata*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- H. Juhaya S. Praja. 2014. *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung, CV Pustaka Setia, Cetakan kedua.
- Hajati, S. Agus Sekarmadji, Sri Winarsi, Oemar Moechthar. 2021. *Politik Hukum Pertanahan Indonesia*. Penada Media Group, Jakarta.
- Ishaq, H. 2022. *Dasar-dasar Ilmu Hukum: Edisi Revisi*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, M. 2017. *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media Group, Jakarta.
- _____. 2021. *Pengantar ilmu hukum*. Prenada Media Group, Jakarta.
- Nurnaningsih Amriani. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Grafindo Persada, Jakarta.
- Pramukti, A. S., & Erdha Widayanto. 2015. *Awas Jangan Beli Tanah Sengketa*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Priadana, M. S., & Sunarsi, D. 2021. *Metode penelitian kuantitatif*. Pascal Books, Tangerang.
- Ramdhan, M. 2021. *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara, Surabaya.
- Santoso, U. 2017. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Prenada Media Group, Jakarta.
- Setiawan, R. 1999. *Pokok-pokok hukum perikatan* (Cet. 6). Bandung: Putra A Bardin.
- Soerjono Seokanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

- Soeroso, R. 2020. *Pengantar ilmu hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Susanti Adi Nugroho. 2009. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Prenada Media, Jakarta.
- Sutedi, A. 2020. *Implementasi prinsip kepentingan umum di dalam pengadaan tanah untuk pembangunan*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), Jakarta.
- Syah, Mudakir Iskandar. 2019. *Panduan Mengurus Sertifikat Dan Penyelesaian Sengketa Tanah*. Bhuana Ilmu Populer, Yogyakarta.
- Urip Santoso. 2015. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Prenada Media Group, Jakarta. Cetakan ke-5.
- Vollmar, H. F. A. 1995. *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid II (Cet. II, I. S. Adiwiarta, Trans)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Yulianingsih, S., & Listyarini, D. 2024. *Pengantar Ilmu Hukum*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, Semarang.

ARTIKEL DALAM JURNAL:

- Abon, M. A., Dantes, K. F., & Adnyani, N. K. S. 2022. Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Waris Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 64-80.
- Anam, Saiful. 2017. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) Dalam Penelitian Hukum. *Legal Opinion*.
- Andri, B. 2024. Tinjauan yuridis ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum dalam sengketa atas tanah: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1473 K/Pdt/2019. *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, 3(1), 13-27.
- Dantes, KF, & Hadi, IGA. 2021. Kekuatan Hukum Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Camat Dalam Jabatannya Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Departemen PPAT. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9 (3), 905-916.
- _____, & Kusuma, P. R. A. 2024. Kebijakan Pemerintah dalam Pemberian Bentuk Ganti Kerugian pada Pengadaan Tanah Berskala Kecil Berbasis Keadilan di Kabupaten Buleleng. *Seminar Nasional Riset Inovatif* (Vol. 9).
- Indratanto, S. P., Nurainun, K. L. K., & Kleden, K. L. (2020). Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1).

- Kesuma, H. S., & Roziqin, R. 2021. Kepastian Hukum Terhadap Penguasaan Tanah Negara Berdasarkan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN). *Journal de Facto*, 8(1), 17-33.
- Koeswahyono, I., & Maharani, D. P. 2022. Rasionalisasi pengadilan agraria di Indonesia sebagai solusi penyelesaian sengketa agraria berkeadilan. *Arena Hukum*, 15(1), 1-19.
- Mangare, S. S. 2024. Proses Penyelesaian Konflik Pertanahan Dan Peran Bpn Menurut Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. *Lex Administratum*, 12(5).
- Mulyadi, & Satino. 2019. Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Bersertifikat Ganda. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Univrab*, 6(1), 147-173.
- Nirwana, N., Patittingi, F., & Nur, S. S. 2018. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak atas Tanah Sesungguhnya dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Rincik Palsu. *Pagaruyuang Law Journal*, 1(2), 180-197.
- Pahlevi, R. R., Zaini, Z. D., & Hapsari, R. A. 2021. Analisis Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) Terhadap Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah. *Pagaruyuang Law Journal*, 5(1), 18-28.
- Pahlevi, R. R., Zaini, Z. D., & Hapsari, R. A. 2021. Analisis Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) Terhadap Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah. *Pagaruyuang Law Journal*, 5(1), 18-28.
- Rato, Dominikus. 2019. "Filsafat Hukum, Suatu Pengantar Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum." *LaksBang Justitia*.
- Suputra, I. G. K. R., Sudiatmaka, K., & Setianto, M. J. 2023. Peran Kantor Pertanahan Dalam Pencegahan Sengketa Dan Konflik Pertanahan Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(4), 66-78.
- Syah, Mudakir Iskandar. 2014. Sertifikat Tanah Ganda Akibat Lemahnya Data Base Pertanahan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Volume 4 No. 2.
- Vanessa Inkha Zefanya Uway. 2017. Kajian Terhadap Hak Milik Atas Tanah Yang Diduduki Secara Melawan Hukum, *Jurnal Lex Administratum* Vol. V/No. 1.
- Wirantini, L. 2016. Sengketa Tanah Setra Karang Rupit Desa Pakraman Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 4(2), 42-56.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara 1960 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara 1999 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang No. 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin. Lembaran Negara Tahun 1960- Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Nomor 2106.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59.

PUTUSAN PENGADILAN:

Putusan Nomor 83/Pdt.G/2017/PN Sgr.

